



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

Jln. Kol. M. Kukuh No.1 Kotabaru, Jambi-36128

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini didasarkan pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 hal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024, yang pada intinya berisi Program Kerja dan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam kurun waktu satu tahun.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia saat ini dan terpeliharanya Lembaga Yudikatif (Mahkamah Agung) sebagai *pilot project* Reformasi Birokrasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas di tahun lalu dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana dan Program Kerja Tahun 2025 dalam rangka peningkatan kinerja menuju terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung RI umumnya serta Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi khususnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami menerima dan menghargai kritik dan saran konstruktif guna menyempurnakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini.

Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

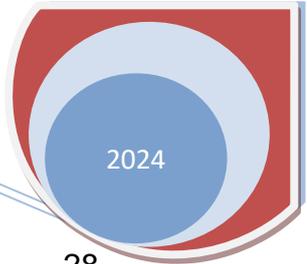


ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.
NIP. 197608032001121001

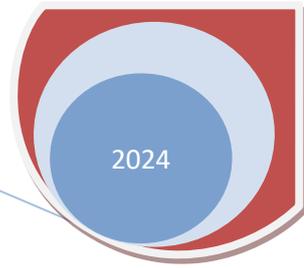


DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi.....		ii
BAB I	Pendahuluan	1
	A. Kebijakan Umum Peradilan.....	1
	B. Visi dan Misi	1
	C. Rencana Strategis.....	2
 BAB II	 A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	 5
	1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	5
	2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	7
	3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	8
	4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	9
	B. Penyelesaian Perkara	9
	1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	9
	2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.....	10
	3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	11
	C. Capaian Prioritas Nasional	13
	1. Posbakum	13
	2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.....	14
	3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	14
 BAB III	 Sumber Daya Manusia	 17
	A. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/Pendidikan.....	17
	B. Mutasi	19
	C. Promosi	20
	D. Pensiun	21
	E. Diklat (SDM Teknis/NonTeknis yang Telah Mengikuti Diklat) ...	21



BAB IV	Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	28
	A. Pengelolaan Keuangan	28
	1. Program Dukungan Manajemen	28
	2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	29
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	30
	1. Kendaraan Dinas	30
	2. Rumah Dinas	31
	3. Prasarana Gedung	32
	4. Pengadaan	34
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	34
	1. Implementasi <i>e-Court</i>	35
	2. Implementasi SIPP	36
BAB V	Peningkatan Pelayanan Publik	38
	A. Pembangunan Zona Integritas	38
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	39
	C. Inovasi Pelayanan Publik	41
	D. Keterbukaan Informasi Publik	43
	E. Penghargaan	44
BAB VI	Pengawasan	46
	A. Internal	46
	B. Evaluasi	48
BAB VII	Penutup	49
	A. Kesimpulan	49
	B. Rekomendasi	50



BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, yaitu kegiatan yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima atas Perma Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada dan dipercayakan oleh publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi membuat evaluasi hasil kinerja tahun 2024 agar dapat memetakan pencapaian dan permasalahan yang ada serta berupaya mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

B. VISI DAN MISI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Dalam menjalankan tugasnya tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Menjadi Pengadilan Modern dengan Orientasi Pelayanan Publik Yang Berkualitas Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

Misi : Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk memperjelas upaya pencapaian keberhasilan visi tersebut, telah dirumuskan 5 misi sebagai fokus program kerjanya :

1. Menjadikan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Berdaya Guna, Berhasil Guna dan Tanggung Jawab, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Meningkatkan Profesionalitas, Integritas, Kapabilitas dan Kredibilitas Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
3. Optimalisasi Pelayanan Publik dan Berkeadilan dengan Berdasarkan Prinsip Keterbukaan, Profesionalisme, Akuntabilitas, Efisien dan Efektifitas.

C. RENCANA STRATEGIS

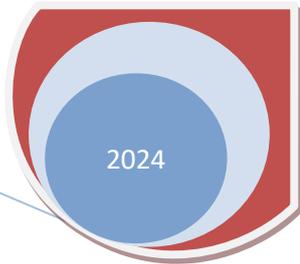
Perencanaan strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui kebijakan yang dibuat oleh pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) beserta jajarannya yang telah menyusun rencana strategis sebagai berikut :

1. Merencanakan dan menyusun Program Kerja. Program Kerja pada dasarnya meliputi tugas pokok dan fungsi.
2. Merencanakan dan menyusun Pembagian Tugas (*Job Description*) yaitu membagi tugas pokok organisasi ke seluruh Sub Bagian dan staf untuk mewujudkan pelaksanaan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas.
3. Merencanakan dan membuat suatu keputusan dengan menunjuk masing-masing Hakim menjadi Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) sebagai tindak lanjut Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/080/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
4. Penyelesaian perkara maksimal dalam waktu 6 bulan.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan mengikutsertakan hakim dan pegawai pada pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung, lembaga lain maupun di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sendiri

- yang dilaksanakan secara rutin melalui rapat pembinaan sebulan sekali dan rapat terbatas sesuai kebutuhan oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris.
6. Melakukan pembaruan sistem Peradilan yang berwibawa, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana cetak biru (*blue print*) yang dibuat Mahkamah Agung.
 7. Memberikan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah melaksanakan pelayanan dalam satu meja pelayanan yang terdiri dari pelayanan perkara, pelayanan informasi dan pengaduan serta pelayanan surat masuk. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai *good governance*/tata kelola pemerintahan yang baik.
 8. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi di era globalisasi ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sudah mempunyai website menggunakan situs berdomain go.id dengan *Home Page*: www.ptunjambi.go.id. Selain sebagai bentuk tindak lanjut pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang kemudian diperbaharui kembali melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP dan aplikasi e-Court di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga turut memberikan akselerasi dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehingga Asas Peradilan Beracara Cepat, Sederhana, Biaya Ringan dan Berkeadilan dapat terealisasi. Sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 38/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/I/2024 yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor

- 387/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka telah dibentuk tim pengelola media sosial dan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang bertugas mengelola media sosial dan website guna memberikan pelayanan keterbukaan informasi dan sekaligus membantu kelancaran tugas peradilan dalam melaksanakan Asas Peradilan Secara Cepat, Sederhana, Biaya Ringan dan Berkeadilan.
9. Dalam rangka memberikan pelayanan informasi tentang kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi kepada masyarakat luas melalui media, Ketua Pengadilan telah menunjuk petugas kehumasan PTUN Jambi yang bertugas untuk melakukan kegiatan komunikasi secara sistematis dalam membangun citra positif pengadilan.
 10. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan.
 11. Mengadakan inventarisasi jumlah data Pegawai (*Bezetting*) yang disusun pada akhir tahun anggaran dan pendataan jumlah pegawai oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
 12. Menyusun daftar kenaikan pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) pegawai setiap tahunnya.
 13. Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana gedung, sarana dan prasarana fasilitas gedung (pengadaan meubelair, alat pengolah data/komputer, meja kerja, meja sidang, kursi kerja) dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Rencana strategis tersebut merupakan pemetaan masalah, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dapat memperkuat pelaksanaan Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.



BAB II

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TAHUN 2024

Pengelolaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Setiap bulan data-data keadaan perkara dilaporkan ke tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan juga ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Perkara yang masuk di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah :

- Pertanahan : 10 perkara
- Kepegawaian : 1 perkara
- Perizinan : - perkara
- Lingkungan Hidup : - perkara
- Tender/Pengadaan Barang dan Jasa : - perkara
- Badan Hukum/Parpol : - perkara
- Kepala Desa dan Perangkat Desa : 4 perkara
- Kepala Daerah : - perkara
- Proses Pemilihan Umum : - perkara
- Pergantian Antar Waktu : - perkara
- Ketenagakerjaan : - perkara
- Sengketa Informasi Publik/KIP : 1 perkara
- Pengadaan Tanah : - perkara
- Fiktif Positif : - perkara
- Penyalahgunaan Wewenang : - perkara
- Tindakan Administrasi Pemerintah : 6 perkara
- Lain-lain : 1 perkara
- Jumlah : 23 perkara

NO	NOMOR PERKARA	PUTUSAN				KET
		DITOLAK	DIKABULKAN	TIDAK DITERIMA (N.O)	DICABUT	
						Putusan : 19
						Ditolak : 2
						Dikabulkan : 5
						Tidak Lolos Dismissal : 1
						Dicabut : 7
						Tidak Diterima (N.O) : 5
						Masih Proses : 5
	JUMLAH	2	5	5	7	

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara yang diselesaikan pada tingkat banding adalah perkara yang diselesaikan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada Tahun 2024 menerima permohonan upaya hukum banding masuk sebanyak 11 perkara.

Tabel 2.2
Keadaan Perkara Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2024

NO	NOMOR PERKARA	PUTUSAN			KETERANGAN
		DITOLAK	DIKABULKAN	TIDAK DITERIMA (N.O)	
1	27/G/2023/PTUN.JBI	√	-	-	-
2	29/G/2023/PTUN.JBI	√	-	-	-
3	1/G/TF/2024/PTUN.JBI	-	√	-	-
4	2/G/2024/PTUN.JBI	√	-	-	-
5	3/G/2024/PTUN.JBI	-	√	-	-
6	4/G/TF/2024/PTUN.JBI	√	-	-	-
7	5/G/TF/2024/PTUN.JBI	√	-	-	-
8	6/G/TF/2024/PTUN.JBI	√	-	-	-
9	10/G/2024/PTUN.JBI	-	-	-	Masih Proses
10	11/G/2024/PTUN.JBI	-	-	-	Masih Proses
11	13/G/2024/PTUN.JBI	-	-	-	Masih Proses

NO	NOMOR PERKARA	PUTUSAN			KETERANGAN
		DITOLAK	DIKABULKAN	TIDAK DITERIMA (N.O)	
					Putusan : 8
					Ditolak : 6
					Dikabulkan : 2
					Masih Proses : 3
					Dicabut : -
					Tidak Diterima (N.O) : -
	JUMLAH	6	2	0	

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara tingkat kasasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 perkara dan dapat dilihat rinciannya pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Keadaan Perkara Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2024

NO	NOMOR PERKARA	PUTUSAN			KETERANGAN
		DITOLAK	DIKABULKAN	TIDAK DITERIMA (N.O)	
1	25/G/2023/PTUN.JBI	√	-	-	-
2	27/G/2023/PTUN.JBI	√	-	-	-
3	29/G/2023/PTUN.JBI	√	-	-	-
4	1/G/TF/2024/PTUN.JBI	√	-	-	-
5	2/G/2024/PTUN.JBI	-	-	-	Masih Proses
6	3/G/2024/PTUN.JBI	-	-	-	Masih Proses
7	4/G/TF/2024/PTUN.JBI	-	-	-	Masih Proses
8	5/G/TF/2024/PTUN.JBI	-	-	-	Masih Proses

NO	NOMOR PERKARA	PUTUSAN			KETERANGAN
		DITOLAK	DIKABULKAN	TIDAK DITERIMA (N.O)	
					Putusan : 4
					Ditolak : 4
					Dikabulkan : -
					Tidak Diterima (NO) : -
					Masih Proses : 4
	JUMLAH	4	0	0	

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tahun 2024 adalah sebanyak 2 perkara dan dapat dilihat rinciannya pada tabel di bawah ini.

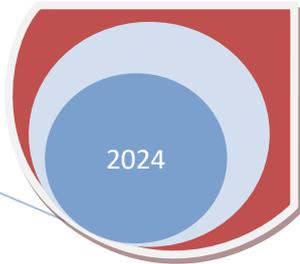
Tabel 2.4
Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2024

NO	NOMOR PERKARA	PUTUSAN			KETERANGAN
		DITOLAK	DIKABULKAN	TIDAK DITERIMA (N.O)	
1	12/G/2023/PTUN.JBI	-	√	-	-
2	20/G/2023/PTUN.JBI	-	-	-	Masih Proses
					Putusan : 1
					Ditolak : -
					Dikabulkan : 1
					Tidak Diterima (N.O) :-
					Masih Proses : 1
	JUMLAH	0	1	0	

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Jumlah sisa perkara tahun 2023 yang diputus tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah sebagai berikut :



Tabel 2.5
Keadaan Penyelesaian Sisa Perkara

Sisa Perkara Tahun 2023	Perkara Masuk Tahun 2024	Perkara yang dicabut	Perkara yang diputus	Tidak Lolos Dismissal	Sisa Perkara Tahun 2024
2	23	7	12	1	5

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

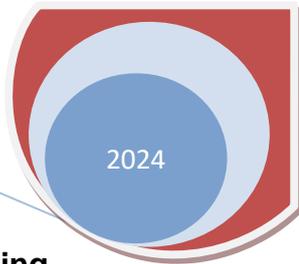
Tabel 2.6
Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2024

NO	NOMOR PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN 2024				KET
		KURANG DARI 3 BULAN	3 – 5 BULAN	5 – 12 BULAN	LEBIH DARI 12 BULAN	
1	29/G/2023/PTUN.JBI	-	√	-	-	-
2	31/G/2023/PTUN.JBI	√	-	-	-	-
3	1/G/TF/2024/PTUN.JBI	√	-	-	-	-
4	2/G/2024/PTUN.JBI	-	-	√	-	-
5	3/G/2024/PTUN.JBI	-	√	-	-	-
6	4/G/TF/2024/PTUN.JBI	-	-	√	-	-
7	5/G/TF/2024/PTUN.JBI	-	√	-	-	-
8	6/G/TF/2024/PTUN.JBI	-	√	-	-	-
9	7/G/2024/PTUN.JBI	√	-	-	-	-
10	8/G/2024/PTUN.JBI	-	√	-	-	-
11	9/G/2024/PTUN.JBI	√	-	-	-	-
12	10/G/2024/PTUN.JBI	-	-	√	-	-

NO	NOMOR PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN 2024				KET
		KURANG DARI 3 BULAN	3 – 5 BULAN	5 – 12 BULAN	LEBIH DARI 12 BULAN	
13	11/G/2024/PTUN.JBI	-	√	-	-	-
14	12/G/TF/2024/PTUN.JBI	√	-	-	-	-
15	13/G/2024/PTUN.JBI	-	-	√	-	-
16	14/G/2024/PTUN.JBI	√	-	-	-	-
17	15/G/TF/2024/PTUN.JBI	√	-	-	-	-
18	16/G/2024/PTUN.JBI	√	-	-	-	-
19	17/G/2024/PTUN.JBI	-	-	-	-	Masih Proses
20	18/G/2024/PTUN.JBI	-	-	-	-	Masih Proses
21	19/G/2024/PTUN.JBI	√	-	-	-	-
22	20/G/2024/PTUN.JBI	√	-	-	-	-
23	21/G/2024/PTUN.JBI	-	-	-	-	Masih Proses
24	22/G/2024/PTUN.JBI	-	-	-	-	Masih Proses
25	23/G/KI/2024/PTUN.JBI	-	-	-	-	Masih Proses
	JUMLAH	10	6	4	0	

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah sebagai berikut :



Tabel 2.7

**Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2024**

No	Satuan Kerja	Perkara Putus	Jumlah Perkara pada Upaya Hukum					
			Banding		Kasasi		Peninjauan Kembali (PK)	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	29/G/2023/PTUN.JBI	√	√	-	√	-	-	√
2	31/G/2023/PTUN.JBI	Dicabut	-	-	-	-	-	-
3	1/G/TF/2024/PTUN.JBI	√	√	-	√	-	-	√
4	2/G/2024/PTUN.JBI	√	√	-	√	-	-	-
5	3/G/2024/PTUN.JBI	√	√	-	√	-	-	-
6	4/G/TF/2024/PTUN.JBI	√	√	-	√	-	-	-
7	5/G/TF/2024/PTUN.JBI	√	√	-	√	-	-	-
8	6/G/TF/2024/PTUN.JBI	√	√	-	-	√	-	-
9	7/G/2024/PTUN.JBI	Dicabut	-	-	-	-	-	-
10	8/G/2024/PTUN.JBI	√	-	√	-	√	-	√
11	9/G/2024/PTUN.JBI	Dicabut	-	-	-	-	-	-
12	10/G/2024/PTUN.JBI	√	√	-	-	-	-	-
13	11/G/2024/PTUN.JBI	√	√	-	-	-	-	-
14	12/G/TF/2024/PTUN.JBI	Dicabut	-	-	-	-	-	-
15	13/G/2024/PTUN.JBI	√	√	-	-	-	-	-
16	14/G/2024/PTUN.JBI	√	-	√	-	√	-	√
17	15/G/TF/2024/PTUN.JBI	Dicabut	-	-	-	-	-	-
18	16/G/2024/PTUN.JBI	Tidak lolos Dismissal	-	-	-	-	-	-
19	17/G/2024/PTUN.JBI	Masih proses	-	-	-	-	-	-
20	18/G/2024/PTUN.JBI	Masih proses	-	-	-	-	-	-
21	19/G/2024/PTUN.JBI	Dicabut	-	-	-	-	-	-
22	20/G/2024/PTUN.JBI	Dicabut	-	-	-	-	-	-
23	21/G/2024/PTUN.JBI	Masih proses	-	-	-	-	-	-
24	22/G/2024/PTUN.JBI	Masih proses	-	-	-	-	-	-
25	23/G/KI/2024/PTUN.JBI	Masih proses	-	-	-	-	-	-

C. Capaian Prioritas Nasional

1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

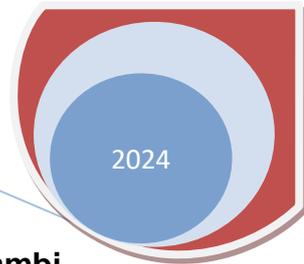
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah melaksanakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau masyarakat yang kurang mampu. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang.

Pemberian pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melayani :

- Pemberian informasi, dokumen, konsultasi, dan *advice* hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penjamin dan pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan secara profesional;
- Melayani konsultasi hukum tata usaha negara;
- Melayani beracara cuma-cuma/prodeo.

Adapun Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk menyelenggarakan Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yaitu Kantor Bahtera Hukum Yurisprudensi yang beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay No. 15 RT.21 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Jam layanan Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah Senin s.d. Kamis pukul 09.00 wib – 12.00 wib. Anggaran untuk pelayanan Posbakum berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) unit eselon Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024 dengan total anggaran untuk Posbakum yaitu sebesar Rp 33.000.000,- yang terbagi atas 2 kode akun yaitu 522131 Belanja Jasa Konsultan Hukum dengan pagu Rp 28.800.000,- dan 521211 ATK Posbakum dengan pagu Rp 4.200.000,-.



Tabel 2.8.

**Penyerapan Anggaran Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Tahun Anggaran 2024**

Kode Akun Belanja	Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	%	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7
522131	Belanja Jasa Konsultan	Rp.28.800.000,-	Rp.28.800.000,-	100	-	0.00
521211	ATK Posbakum	Rp.4.200.000,-	Rp.4.200.000,-	100	-	0.00
Jumlah		Rp.33.000.000,-	Rp. 33.000.000, -	100	-	0.00

Dengan alokasi anggaran tersebut, sepanjang Tahun 2024 tercatat sebanyak 96 orang pencari keadilan yang telah dilayani oleh Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Sidang keliling / pelayanan sidang terpadu adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan dan kendala untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Untuk tahun 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak terdapat kegiatan sidang keliling/pelayanan sidang terpadu.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 (satu) tingkat Peradilan. Jika pemohon/penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi. Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari

awal sampai akhir. Pemohon/Penggugat harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Langkah-Langkah mengajukan permohonan Prodeo, yaitu sebagai berikut :

- 1) Datang ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
 - Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya;
 - Surat permohonan dapat dibuat sendiri atau melihat dari contoh gugatan di PTUN Jambi dan apabila tidak dapat membuatnya, Pemohon dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di PTUN Jambi;
 - Jika Pemohon tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua PTUN Jambi;
 - Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
2. Menunggu panggilan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
 - Pengadilan akan mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal, waktu dan tempat sidang kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon ke alamat yang tertera disurat gugatan.
3. Menghadap Persidangan
 - Datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Diupayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat ;
 - Setelah para pihak datang, maka Majelis Hakim akan memeriksa permohonan Prodeo dan Majelis Hakim akan Memeriksa surat bukti untuk menilai ketidakmampuan Pemohon, dan untuk Para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang kebenaran ketidakmampuan Penggugat;
 - Pemohon/Penggugat mengajukan surat bukti seperti SKTM (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/Jamkesda/Askeskin/Gakin dapat dilampirkan), dan terkadang juga dihadirkan 2 (dua)

orang saksi (jika Majelis Hakim memerlukannya), saksi yang dimaksud adalah orang yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo, misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dan lain-lain;

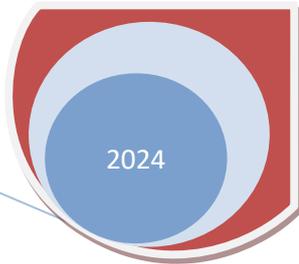
4. Pengambilan keputusan untuk berperkara secara Prodeo

- Jika memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara Prodeo;
- Jika Pemohon orang yang mampu maka diberikan Penetapan tidak dapat berperkara secara Prodeo. Maka Pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.

5. Proses Persidangan Perkara

Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara sampai adanya Putusan Pengadilan.

Pada tahun 2024 belum ada pencari keadilan yang mengajukan perkara prodeo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SUMDER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/PENDIDIKAN

Peningkatan dan efektifitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak terlepas dari pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan. Ketersediaan SDM yang berkualitas akan sangat menentukan untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik pegawai teknis dan pegawai non teknis harus bersinergi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pokok dan fungsi peradilan. Sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan pekerjaannya. Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2024 berjumlah 25 orang yang terdiri dari Hakim, Pegawai dan PPNPN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1 Orang
2.	Wakil Ketua	1 Orang
3.	Hakim	3 Orang
4.	Panitera	1 Orang
5.	Sekretaris	1 Orang
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan	1 Orang
7.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Orang
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1 Orang
9.	Panitera Muda Perkara	1 Orang

10.	Panitera Muda Hukum	1 Orang
11.	Panitera Pengganti	3 Orang
12.	Juru Sita Pengganti	-
13.	Fungsional Umum/Pelaksana	4 Orang
14.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	2 Orang
15.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	4 Orang
Jumlah		25 Orang

Dari data Pegawai pada tabel di atas terdapat 2 (dua) Panitera Pengganti yang diperbantukan, yaitu 1 (satu) Panitera Pengganti di Kepaniteraan Muda Perkara dan 1 (satu) Panitera Pengganti di Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 3.2.
Komposisi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jabatan

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Andri Swasono, S.H., M.Kn	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua
2	Oktova Primasari, S.H.	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua
3	Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim
4	Yohanna Petresia, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim
5	Sekar Annisa, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim
6	Daniel Hasiholan Siagian, S.H.	Pembina (IV/a)	Panitera
7	Rizki Arianto, S.E.	Pembina (IV/a)	Sekretaris
8	lin Rahmawati, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Perkara
9	Yoshinta Mage, S.H., M.H.	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Hukum
10	Fransisca Hutagalung, S.E.	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
11	Maya Sari, S.E., M.H.	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Umum dan Keuangan

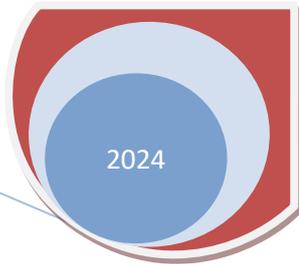
No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
12	Ferra Sari, ST	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
13	Ronald Hermanto, S.H., M.H.	Penata Tk I (III/d)	Panitera Pengganti
14	Rusianto, S.H.	Penata (III/c)	Panitera Pengganti
15	Toto Subroto, S.H.	Penata (III/c)	Panitera Pengganti
16	Dede Febrizal Rachman, S.H	Penata Muda Tk.I (III/b)	Klerek - Analis Perkara Peradilan
17	Cici Amelia Sari, S.Psi.	Penata Muda Tk.I (III/b)	Operator – Penata Layanan Operasional
18	Heru Aryandi, S. Psi	Penata Muda Tk I (III/b)	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan
19	Edfin Hasrisoputra, S.H.	Penata Muda (III/a)	Klerek - Analis Perkara Peradilan
20	Rayhan Rahmadi, S.H.	Penata Muda (III/a)	Klerek - Analis Perkara Peradilan
21	Lasono	Juru (I/c)	Petugas Keamanan

Tabel 3.3.
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	1 Orang
2	Sarjana (S1)	14 Orang
3	Magister (S2)	6 Orang

B. MUTASI

Mutasi masuk dan mutasi keluar Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

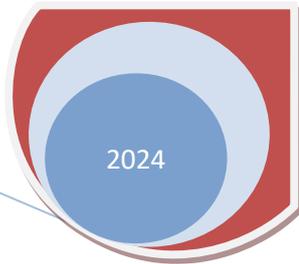


Tabel 3.3.
Mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2024

No	Nama	Gol. Ruang	Jabatan Lama	Jabatan Baru	TMT	Ket
1	Aning Widi Rahayu, S.H.	IV/c	Ketua PTUN Jambi	Ketua PTUN Bnajarmasin	09/01/2024	Mutasi Keluar
2	Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H	IV/c	Ketua PTUN Pangkal Pinang	Ketua PTUN Jambi	11/01/2024	Mutasi Masuk
3	Heru Aryandi, S. Psi	III/b	Analisis Tata Laksana PTTUN Palembang	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan PTUN Jambi	15/01/2024	Mutasi Masuk
4	Arie Guntoro, S.H.	III/a	Klerek - Analisis Perkara Peradilan PTUN Jambi	Klerek - Analisis Perkara Peradilan PTUN Palembang	05/02/2024	Mutasi Keluar
5	Alvin Bagus Setyawan, S.T.	III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama PTUN Jambi	Pranata Komputer Ahli Pertama Dirjen Badilmiltun	13/05/2024	Mutasi Keluar
6	Effendi, S.H.	IV/c	Wakil Ketua PTUN Jambi	Wakil Ketua PTUN Pekanbaru	15/07/2024	Mutasi Keluar
7	Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H	IV/c	Ketua PTUN Jambi	Ketua PTUN Pontianak	30/07/2024	Mutasi Keluar
8	Lailaturrahmah, S.H.	III/b	Hakim PTUN Jambi	Hakim PTUN Palangkaraya	06/08/2024	Mutasi Keluar
9	Sekar Annisa, S.H.	III/b	Hakim PTUN Palangkaraya	Hakim PTUN Jambi	06/08/2024	Mutasi Masuk

C. PROMOSI

Promosi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.4.
Promosi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2024

No	Nama	Gol. Ruang	Jabatan Lama	Jabatan Baru	TMT
1	Andri Swasono, S.H., M.Kn.	IV/c	Wakil Ketua PTUN Banjarmasin	Ketua PTUN Jambi	31/07/2024
2	Oktova Primasari, S.H.	IV/b	Hakim PTUN Jakarta	Wakil Ketua PTUN Jambi	26/08/2024

D. PENSIUN

Pada tahun 2024 pegawai yang memasuki masa pensiun di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Pensiun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2024

No	Nama	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	TMT	Ket
			N I H I L		

E. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia teknis dan non teknis yudisial serta dalam rangka melakukan pembinaan, pengelolaan terhadap sumber daya manusia, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengikutsertakan hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional dan fungsional umum untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Koordinator Wilayah (Korwil).

Tabel 3.6.
Diklat Yang Diikuti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2024

No	Nama	Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Kegiatan	Tempat dan Waktu
1	- Effendi, S.H. - Rizki Arianto, S.E. - Daniel Hasiholan Siagian, S.H. - Fransisca Hutagalung, S.E. - Rusianto, S.H. - Winarto	Koordinasi dan Konsultasi	PTTUN Palembang 10–12 Januari 2024
2	- Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H.	Koordinasi dan Konsultasi	PTTUN Palembang 11–12 Januari 2024
3	- Maya Sari, S.E., M.H. - Aripin Zuardi	Konsolidasi dan Rekonsiliasi Data pada Aplikasi SAKTI Tingkat Koordinator Wilayah DIPA 005.05 Tahun 2024	Denpasar 24–26 Januari 2024
4	- Alvin Bagus Setyawan, S.T.	Uji Kompetensi Level-1 PBJP	PTUN Jambi (<i>Online</i>) 19 Februari 2024
5	- Rizki Arianto, S.E. - Daniel Hasiholan Siagian, S.H. - Maya Sari, S.E., M.H. - Alvin Bagus Setyawan, S.T. - Aripin Zuardi - Winarto	Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4	PTUN Jambi (<i>Online</i>) Bulan Februari – Mei 2024 (Dua minggu sekali setiap hari Jumat)
6	- Lailaturrahmah, S.H.	Bimbingan Teknis Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	PTUN Jambi (<i>Online</i>) 5–7 Februari 2024
7	- Aripin Zuardi	Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penyampaian LK Tingkat UAKPA lingkup KPPN Jambi	KPPN Jambi 1 Februari 2024
8	- Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H. - Rizki Arianto, S.E.	Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung RI	Balai Sidang Jakarta Convention Center 18–21 Februari 2024
9	- Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.	Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Khusus Profesi Advokat	Fakultas Hukum Universitas Jambi Mendalo 18 Februari 2024
10	- Maya Sari, S.E., M.H.	Pelatihan PBJP Level-1 secara <i>Massive Open Online Course</i> (MOOC) pada website e-Learning LKPP	PTUN Jambi (<i>Online</i>) Februari 2024
11	- Effendi, S.H. - Rizki Arianto, S.E.	Koordinasi dan Konsultasi	Biro Keuangan BUA MA RI 6–8 Maret 2024
12	- Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H.	Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MUSRENBANG RKPD) Kota Jambi Tahun 2025	Swiss-Belhotel Jambi 14 Maret 2024

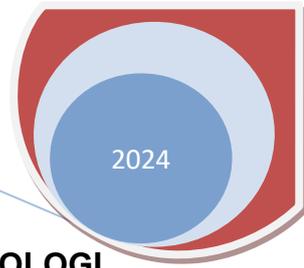
No	Nama	Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Kegiatan	Tempat dan Waktu
13	- Maya Sari, S.E., M.H.	Pelatihan <i>Online</i> Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Batch II Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI Wilayah Medan	PTUN Jambi (<i>Online</i>) 22–24 April 2024
14	- Daniel Hasiholan Siagian, S.H.	Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	Hotel Grandhika Pemuda Semarang 17–21 April 2024
15	- Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H. - Effendi, S.H. - Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.	Sosialisasi Hasil Rumusan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	Novotel Semarang 18–20 April 2024
16	- Iin Rahmawati, S.H., M.H.	Rapat Monitoring Pelaksanaan Putusan (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	PTUN Jambi (<i>Online</i>) 30 April 2024
17	- Fransisca Hutagalung, S.E. - Cici Amelia Sari, S.Psi.	Kegiatan Pembinaan Teknis Terkait Permasalahan dalam Penggunaan Aplikasi SIASN	UPT BKN Jambi 29 April 2024
18	- Aripin Zuardi	<i>Refreshment</i> Penyelesaian Rekonsiliasi, Kualitas Data, dan Laporan Keuangan TA 2023 (<i>Audited</i>)	KPPN Jambi 6 Mei 2024
19	- Iin Rahmawati, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Upaya Hukum secara Elektronik bagi Panitera Muda Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2024	PTUN Jambi (<i>Online</i>) 20–22 Mei 2024
20	- Cici Amelia Sari, S.Psi.	Pemutakhiran Data PNS, PPPK dan PPNPN Pemerintah Pusat	Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jambi 13 Mei 2024
21	- Aripin Zuardi	Kelas BAHASA mengenai Modul Aset, Persediaan dan Pelaporan	KPPN Jambi 18 Mei 2024
22	- Yoshinta Mage, S.H., M.H.	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berbasis Aplikasi/ Website (e-monev) Tahun 2024	Aston Jambi Hotel & Conference Center 21 Mei 2024
23	- Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H. - Daniel Hasiholan Siagian, S.H. - Rayhan Rahmadi, S.H.	Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik	Pengadilan Tinggi Agama Jambi 29 Mei 2024
24	- Maya Sari, S.E., M.H. - Aripin Zuardi	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyelesaian Penertiban BMN dalam Rangka Implementasi SIMAN	Pengadilan Tinggi Jambi 29–30 Mei 2024

No	Nama	Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Kegiatan	Tempat dan Waktu
		v2 Koordinator Wilayah (DIPA 01) Jambi	
25	- Aripin Zuardi	Sosialisasi PMK Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan BMN dengan Menggunakan SIMAN dan Bimbingan Teknis Aplikasi SIMAN Versi 2	Aula Balam Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Jambi 28 Mei 2024
26	- Effendi, S.H.	Narasumber pada kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Satker dan Jajaran Polres/Ta Polda Jambi	Polda Jambi 4 Juni 2024
27	- Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H. - Rizki Arianto, S.E. - Winarto	Pengesahan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang	PTTUN Palembang 12 Juni 2024
28	- Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H. - Rizki Arianto, S.E. - Winarto	Pengesahan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi oleh Pt. Sekretaris Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung RI 13–16 Juni 2024
29	- Effendi, S.H.	Narasumber pada acara <i>Legal Reasoning</i> dalam Suatu Perkara Tata Usaha Negara	Hotel Aston Jambi 12 Juni 2024
30	- Yohanna Petresia, S.H.	Bimbingan Teknis Pendalaman Gugatan Melalui <i>Citizen Law Suit (CLS)</i> , <i>Class Action</i> dan <i>Legal Standing</i> bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	PTUN Jambi (<i>Online</i>) 26–28 Juni 2024
31	- Daniel Hasiholan Siagian, S.H. - Iin Rahmawati, S.H., M.H. - Dede Febrizal Rachman, S.H.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	Novotel Palembang Hotel & Residence 26 –28 Juni 2024
32	- Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H. - Muhammad Faezal Ilhami, S.H., M.Kn.	Koordinasi dan Konsultasi	PTTUN Palembang 11–12 Juli 2024
33	- Aripin Zuardi	Sosialisasi Penyelesaian Rekonsiliasi/To do List/Tutup Periode Juni 2024 dan Penyusunan LK Tingkat UAKPA lingkup KPPN Jambi Periode Semester I Tahun 2024	KPPN Jambi 9 Juli 2024
34	- Daniel Hasiholan Siagian, S.H.	Sosialisasi Pedoman Eksekusi	PTUN Jambi (<i>Online</i>)

No	Nama	Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Kegiatan	Tempat dan Waktu
	- Iin Rahmawati, S.H., M.H.	Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	24–26 Juli 2024
35	- Toto Subroto, S.H.	Bimbingan Teknis Penyusunan Berita Acara Persidangan bagi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2024	PTUN Jambi (<i>Online</i>) 24–26 Juli 2024
36	- Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Sengketa Pengesahan Badan Hukum bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	PTUN Jambi (<i>Online</i>) 24–26 Juli 2024
37	- Heru Aryandi, S.Psi. - Aripin Zuardi	Pembinaan Kearsipan Mahkamah Agung RI	Pengadilan Tinggi Agama Jambi 19 Juli 2024
38	- Rizki Arianto, S.E. - Daniel Hasiholan Siagian, S.H. - Muhammad Amin Putra, S.H., M.H. - Muhammad Faezal Ilhami, S.H., M.Kn.	Koordinasi dan konsultasi	PTTUN Palembang 30 Juli –1 Agustus 2024
39	- Iin Rahmawati, S.H., M.H. - Rayhan Rahmadi, S.H.	Sosialisasi dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)	Hotel BW Luxury Jambi 5 Agustus 2024
40	- Andri Swasono, S.H., M.Kn. - Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.	Narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2024	Hotel BW Luxury Jambi 12 Agustus 2024
41	- Andri Swasono, S.H., M.Kn.	Kick-Off Pelaksanaan Nota Kesepahaman Mahkamah Agung RI dengan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI serta Seminar dan Lokakarya “Tata Kelola Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Keadilan Iklim”	Hotel Shangri-La Jakarta 13–16 Agustus 2024
42	- Rizki Arianto, S.E. - Maya Sari, S.E., M.H.	Asistensi Optimalisasi Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Digipay Satu, Transaksi CMS Bank BRI pada Satuan Kerja Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi	KPPN Jambi 14 Agustus 2024
43	- Andri Swasono, S.H., M.Kn. - Oktova Primasari, S.H. - Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.	Pembinaan tentang Peran Pengawasan dan Pembinaan Pimpinan dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim dan	Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta 13–15 September 2024

No	Nama	Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Kegiatan	Tempat dan Waktu
		Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	
44	- Edfin Hasrisoputra, S.H. - Rayhan Rahmadi, S.H.	Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Gelombang II Wilayah Palembang secara <i>Blended Learning</i> Tahun 2024	PTUN Jambi (<i>Online</i>) 9 September –23 November 2024 Balai Diklat Keagamaan Palembang (Klasikal) 2–7 Desember 2024
45	- Andri Swasono, S.H., M.Kn. - Oktova Primasari, S.H. - Daniel Hasiholan Siagian, S.H.	Sosialisasi Juklak Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	Hotel Adimulia Medan 3–5 Oktober 2024
46	- Andri Swasono, S.H., M.Kn.	Pemateri pada Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA) Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) Provinsi Jambi Angkatan XVI Tahun 2024 dengan materi “HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA”	Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi 11 Oktober 2024
47	- Rizki Arianto, S.E.	Rapat Koordinasi	Hotel Platinum Tunjungan Surabaya 23–25 Oktober 2024
48	- Toto Subroto, S.H.	Pelaksanaan Refreshment Bendahara terkait Pengelolaan Kas dan Rekening	KPPN Jambi 23 Oktober 2024
49	- Iin Rahmawati, S.H., M.H.	Mentor mendampingi peserta Pelatihan Dasar (Latsar) atas nama Rayhan Rahmadi, S.H.	PTUN Jambi (<i>Online</i>) 25 Oktober 2024
50	- Yoshinta Mage, S.H.	Mentor mendampingi peserta Pelatihan Dasar (Latsar) atas nama Edfin Hasrisoputra, S.H	PTUN Jambi (<i>Online</i>) 25 Oktober 2024
51	- Sekar Annisa, S.H.	Kelas e-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi Batch 1	PTUN Jambi (<i>Online</i>) 4–6 November 2024
52	- Ferra Sari, S.H. - Heru Aryandi, S.Psi.	Bimbingan Teknis Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	PTUN Jambi (<i>Online</i>) 13–15 November 2024
53	- Rizki Arianto, S.E. - Maya Sari, S.E., M.H. - Aripin Zuardi	Bimbingan Teknis Layanan BMN	Pengadilan Tinggi Jambi 20 November 2024
54	- Lasono	Kegiatan Pemetaan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	PTUN Jambi (<i>Online</i>) 26 November 2024

No	Nama	Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Kegiatan	Tempat dan Waktu
55	- Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.	Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Angkatan XX Tahun 2024 dilaksanakan dengan metode <i>blended learning</i>	PTUN Jambi (Mandiri e-Learning) 25–30 November 2024 Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta (Klasikal) 1–15 Desember 2024
56	- Edfin Hasrisoputra, S.H. - Rayhan Rahmadi, S.H.	Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Gelombang II Wilayah Palembang secara <i>Blended Learning</i> Tahun 2024 dengan tahapan akhir Klasikal dan Seminar Laporan Pelaksanaan Aktualisasi	Kampus Balai Diklat Keagamaan Palembang 2–8 Desember 2024



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

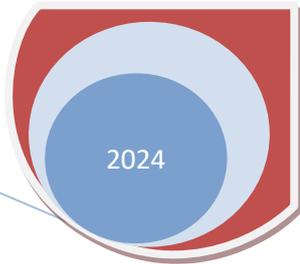
Pengelolaan keuangan yang berkualitas pada suatu instansi sangat dibutuhkan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Realisasi anggaran merupakan salah satu komponen penilaian IKPA, dimana realisasi anggaran yang berkualitas adalah sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam fungsinya sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, memerlukan anggaran untuk menjalankan kegiatan perkantoran dan persidangan. Oleh karena itu terdapat 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yaitu DIPA 01 dan DIPA 05. DIPA 01 adalah Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal. DIPA 01 digunakan untuk kegiatan operasional dan non-operasional perkantoran, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Sedangkan DIPA 05 digunakan untuk kegiatan persidangan dan Pos Bantuan Hukum yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

1. Program Dukungan Manajemen

Realisasi Anggaran bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 untuk DIPA 01 kode satker 578839 adalah sebesar : Rp.4.211.500.925,- (97,72%) dari jumlah anggaran sebesar Rp. 4.309.734.000,-

a) Belanja Pegawai



Pagu	Rp. 2.951.694.000,-
Realisasi	Rp. 2.876.491.800,-
Sisa	Rp. 75.202.200,-

b) Belanja Barang Operasional dan Non Operasional

Pagu	Rp. 1.358.040.000,-
Realisasi	Rp. 1.335.009.125,-
Sisa	Rp. 23.030.875,-

c) Belanja Modal

Pagu	Rp. 0,-
Realisasi	Rp. 0,-
Sisa	Rp. 0,-

Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebagian besar dari mata anggaran belanja uang makan PNS, belanja tunjangan fungsional PNS, belanja keperluan perkantoran serta belanja langganan daya dan jasa.

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)

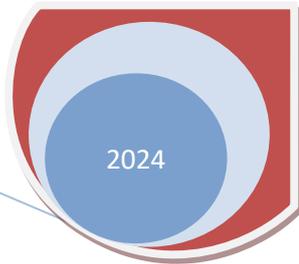
Realisasi Anggaran bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 adalah sebesar Rp 42.200.000,- (98,81%) dari jumlah total anggaran sebesar Rp 42.710.000,-

a) Belanja Barang

Pagu	Rp. 42.710.000,-
Realisasi	Rp. 42.200.000,-
Sisa	Rp. 510.000,-

Sisa anggaran yang tidak terealisasi yaitu dari mata anggaran biaya pembebasan perkara (prodeo).

Untuk lebih detilnya mengenai realisasi anggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4.1.
Realisasi Belanja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Tahun Anggaran 2024

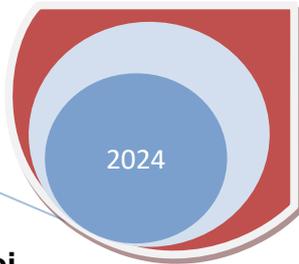
Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	%	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7
578839						
51	Belanja Pegawai	Rp.2.951.694.000,-	Rp.2.876.491.800,-	97.45	Rp.75.202.200,-	2.55
52	Belanja Barang	Rp.1.358.040.000,-	Rp.1.335.009.125,-	98.30	Rp 23.030.875,-	1.70
53	Belanja Modal	Rp 0,-	Rp 0,-	0	Rp 0,-	0.00
Jumlah		Rp.4.309.734.000,-	Rp. 4.211.500.925,-	97.72	Rp 158.233.075, -	2.28
578840						
52	Belanja Barang	Rp. 42.710.000,-	Rp. 42.200.000,-	98.81	Rp. 510.000, -	1.19
Jumlah		Rp. 42.710.000,-	Rp. 42.200.000,-	98.81	Rp. 510.000, -	1.19

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana kantor sangat diperlukan untuk menunjang terlaksananya kegiatan perkantoran. Dalam pengelolaannya, memerlukan proses kerja sama yang mendayagunakan semua unsur pegawai yang ada, agar sarana dan prasarana yang ada digunakan secara efektif dan efisien.

1. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah sebagai berikut :



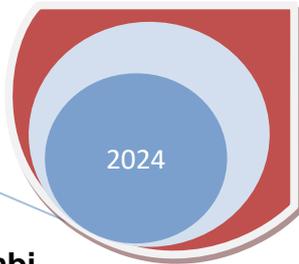
Tabel 4.2.

Data Kendaraan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	JENIS KENDARAAN RODA 4					
1.	Sedan Toyota Vios	2007	√	-	-	1 Unit
2.	Minibus Toyota Kijang LSX	2005	√	-	-	1 Unit
3.	Minibus Toyota Innova Tipe E	2011	√	-	-	1 Unit
4.	Toyota Avanza Tipe G	2011	√	-	-	1 Unit
5.	Minibus Toyota Innova Tipe G	2012	√	-	-	1 Unit
6.	Nissan X-Trail	2012	√	-	-	1 Unit/ Pinjam Pakai dari Gubernur
7.	Minibus Toyota Innova Reborn Tipe G	2023	√	-	-	1 Unit/Hibah dari Pemerintah Kota Jambi
II	JENIS KENDARAAN RODA 2					
1.	Honda Supra X	2007	√	-	-	1 Unit
2.	Honda Supra X	2008	√	-	-	3 Unit
JUMLAH			11	0	0	11 Unit

2. Rumah Dinas

Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah sebagai berikut :



Tabel 4.3.

Data Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	RUMAH DINAS					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	√	-	-	-
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√	-	-	-
4.	Rumah Dinas Panitera	1	√	-	-	-
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1	√	-	-	-
JUMLAH		4	4	0	0	-

3. Prasarana Gedung

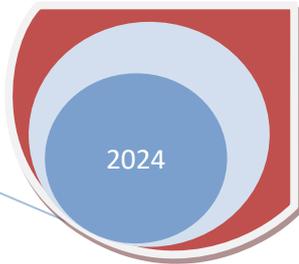
Prasarana gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.

Prasarana Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	1	Baik
2.	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3.	Ruang Hakim	1	Baik
4.	Ruang Panitera	1	Baik
5.	Ruang Sekretaris	1	Baik
6.	Ruang Sidang Utama	1	Baik
7.	Ruang Sidang Kecil	1	Baik
8.	Ruang Panitera Muda Perkara	1	Baik
9.	Ruang Panitera Muda Hukum	1	Baik
10.	Ruang Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	Baik
11.	Ruang Kasubbag Umum dan Keuangan	2	Baik

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
12.	Ruang Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Baik
13.	Ruang Mushola	1	Baik
14.	Ruang Rapat	1	Baik
15.	Ruang Posbakum	1	Baik
16.	Ruang Laktasi	1	Baik
17.	Ruang Toilet Umum	3	Baik
18.	Ruang Toilet Pegawai	7	Baik
19.	Ruang Toilet Ketua	1	Baik
20.	Ruang Toilet Wakil	1	Baik
21.	Ruang Toilet Panitera	1	Baik
22.	Ruang Toilet Disabilitas	1	Baik
23.	Ruang Perpustakaan	1	Baik
24.	Ruang Server	1	Baik
25.	Ruang Humas	1	Baik
26.	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik
27.	Ruang Arsip	2	Baik
28.	Ruang Pantry	1	Baik
29.	Ruang Gudang	4	Baik
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1.	Komputer	28	Baik (28), RR (0), RB (0)
2.	Laptop	18	Baik (18), RR (0), RB (0)
3.	Televisi	5	Baik (3), RR (2), RB (0)
4.	Mesin Fotokopi	1	Baik (1), RR (0), RB (0)
5.	AC	25	Baik (25), RR (0), RB (0)
6.	Faximile	2	Baik (2), RR (0), RB (0)
7.	Server	2	Baik (2), RR (0), RB (0)
8.	UPS	6	Baik (6), RR (0), RB (0)
9.	Scanner	3	Baik (3), RR (0), RB (0)
10.	Printer	17	Baik (17), RR (0), RB (0)
11.	Genset	2	Baik (2), RR (0), RB (0)
JUMLAH		109	Baik (109), RR (0), RB (0)



4. Pengadaan

Pengadaan sarana dan prasarana melalui belanja modal selama tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.

Pengadaan Melalui Belanja Modal Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Pengadaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
		NIHIL		

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi merupakan sarana yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebuah pengadilan serta mengacu kepada perkembangan teknologi baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Dengan teknologi informasi maka akses publik untuk mendapatkan sebuah informasi pada pengadilan akan menjadi lebih mudah dan cepat.

Dalam rangka mendukung dan menjamin pelaksanaan administrasi pengelolaan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi secara manual ke administrasi berbasis teknologi informasi. Adapun aplikasi yang telah digunakan saat ini adalah administrasi perkara berbasis elektronik yaitu pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan *e-Court*.

Dukungan teknologi informasi ini mutlak dibutuhkan. Pembenahan dan peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi Pengadilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu yang hal tersebut selaras dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/ 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

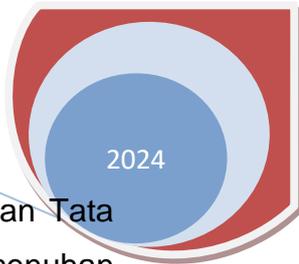
Dengan adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan *e-Court*, maka peningkatan administrasi, transparansi dan akuntabilitas di seluruh pengadilan yang membutuhkan akses terhadap data yang akurat akan dapat tercapai. Hal ini dikarenakan data yang dimasukkan oleh setiap pengadilan yang dikelola melalui sistem akan memungkinkan Mahkamah Agung secara efektif dan efisien mengelola sumber daya manusia dan anggarannya, mengawasi kinerja hakim dan staf pengadilan, memonitor kinerja dan riwayat data perkara, meningkatkan manajemen alur perkara dan alokasi sumber daya, mengurangi penundaan dan tunggakan perkara, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan, publik dan media.

Melihat pentingnya penerapan informasi ke publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memiliki website resmi dengan alamat website <http://ptun-jambi.go.id>. Dengan adanya website ini publik bisa mendapatkan informasi yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Selain website resmi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga memiliki beberapa media sosial seperti : Facebook, Instagram, Channel Youtube yang juga digunakan sebagai sarana penyebaran informasi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi kepada publik.

1. Implementasi e-Court

Sejak tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Jambi telah memiliki e-Court Corner/Pojok Pengadilan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai e-Court. e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, Pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Dalam hal pendaftaran perkara *online*, saat ini baru dikhususkan untuk advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut.



Demi kelancaran dalam mendukung program e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah menyiapkan bandwidth yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan akses internet di kantor yang bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa provider internet. Di samping itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen pembayaran biaya panjar perkara. Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagai pengadilan tempat mendaftar perkara yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Untuk tahun 2024 ini semua perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sudah menggunakan e-court, dengan kata lain untuk tahun 2024 realisasi e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah 100%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6.
Data Implementasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2024

Jumlah Perkara		Jumlah Pengguna Layanan e-Litigasi		
e-Court	e-Litigasi	Pengguna Terdaftar	Pengguna Lain	Total
23	23	40	3	43

2. Implementasi SIPP

Pengadilan Tata Usaha Jambi telah lama melaksanakan dan menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparatur peradilan dalam proses administrasi perkara (Fungsi administrasi), SIPP juga telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM (fungsi *Whole of Government*), aplikasi SIPP juga difungsikan untuk



memonitor kinerja Hakim dan aparaturnya pengadilan oleh pimpinan (Fungsi Pengawasan).

Selain itu salah satu fungsi utama SIPP adalah untuk memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara, misalnya informasi pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah (Fungsi Transparansi, akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi).

Dengan diluncurkannya aplikasi E-court, berupa persidangan yang dilakukan secara elektronik pada tahun 2019, maka Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pada saat ini telah bersinergi dengan aplikasi E-Court yang secara elektronik juga termuat dalam SIPP, sehingga dalam pelaksanaan administrasi persidangan dapat dilaksanakan sesuai dengan asas persidangan Mudah, Cepat dan Biaya Murah.

Aplikasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi terkoneksi dengan SIPP Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. Informasi perkara dapat diakses oleh para pencari keadilan cukup melalui SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan alamat : 192.168.1.253/sipp yang saat ini menggunakan SIPP Versi 5.6.4.

Untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan SIPP secara nasional, setiap bulan telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara dimana setiap bulan dilakukan pemeringkatan nilai implementasi SIPP untuk seluruh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Tabel 4.7.

Data Implementasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2024

Jumlah Perkara	Kinerja	Kepatuhan	Kelengkapan	Kesesuaian	Total
23	19,29	50,00	10,00	20,00	99,29

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, Daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan tersebut wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau melebihi dari harapan masyarakat. Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan.

A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat dan berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai Zona Integritas mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Untuk menjadi unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM harus memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses yang akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sampai saat ini belum memiliki predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Meskipun demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memiliki sertifikat akreditasi penjaminan mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dengan Nomor : TASPM.07-TUN/QMR/SERTIFIKAT/9/2022 dengan **Nilai A excellent**. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Prima (Indonesia *Court Performance Excellent*-ICPE).

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah suatu kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. PTSP merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Pelayanan publik di setiap instansi terus ditingkatkan dan dipermudah, saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ingin memberikan pelayanan publik dengan mudah dan cepat yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal permohonan sampai akhir/diterbitkannya sebuah dokumen dilakukan di satu tempat yaitu di ruang PTSP.

Disamping memberikan pelayanan kepada publik dengan mudah dan cepat, PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga memberikan pelayanan dengan memperhatikan kenyamanan para penggunanya. Fasilitas yang terdapat di ruang PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi diantaranya :

1. Ruang tunggu yang bersih dan dilengkapi dengan Air Conditioner;

2. Air minum gratis;
3. *Charging station* untuk mengisi baterai ponsel;
4. Ruang laktasi;
5. Musholla;
6. Toilet disabilitas;
7. Alat bantu disabilitas dan *guiding block*;
8. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI;
9. Tempat parkir yang luas

Selain fasilitas-fasilitas tersebut, PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi juga memiliki PTSP Online yang dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melainkan bisa melalui sarana komunikasi lainnya seperti : telepon, whatsapp ataupun video conference. PTSP Online ini dapat diakses melalui website resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau ke Alamat : ptsp.ptun-jambi.go.id.

Secara umum, prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut :

1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan;
2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan;
3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas ke *back office* untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.



Gambar 5.1.
Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi pelayanan publik untuk masyarakat pengguna peradilan yang telah diterapkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yaitu :

1. Aplikasi WA PATIN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi memiliki inovasi pelayanan publik berupa aplikasi WhatsApp PATIN. PATIN merupakan singkatan dari : **PTUN Jambi Aktif, Tanggap, Informatif dan Notifikasi**. Melalui aplikasi yang berbasis WhatsApp ini masyarakat bisa mendapatkan informasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mengenai biaya perkara, jadwal sidang dan lain-lain tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan mengklik logo PATIN di website Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau dengan mengirim pesan WhatsApp ke nomor PATIN yaitu : **0821-8076-5383**



Gambar 5.2.
Aplikasi WA PATIN

2. Aplikasi SIRETAS

Siretas (Sistem REservasi disabiliTAS) merupakan sebuah sistem reservasi secara online bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Layanan yang dimaksud adalah seluruh layanan yang tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara. Adanya aplikasi SIRETAS diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada para penyandang disabilitas. Layanan SIRETAS ini dapat diakses melalui website resmi Pengadilan Tata Usaha Negara atau bisa juga langsung ke alamat : siretas.ptun-jambi.go.id



Gambar 5.3.
Aplikasi SIRETAS (Sistem Reservasi Disabilitas)

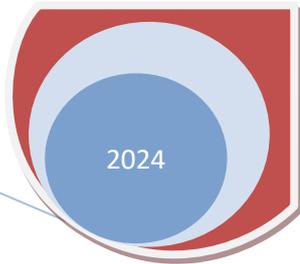
3. Aplikasi E-PPID PTUN Jambi

Setiap badan publik wajib menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, untuk itu setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Demi meningkatkan lagi pelayanan terkait penyediaan akses informasi publik tersebut maka dibuatlah aplikasi E-PPID (Elektronik – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) PTUN Jambi yaitu aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi seperti misalnya putusan pengadilan dan lain-lain tanpa harus datang langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Dengan adanya E-PPID PTUN jambi ini diharapkan pelayanan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dapat berjalan efektif, sehingga hak dan kewajiban badan publik maupun pemohon informasi dapat dilaksanakan dengan optimal. Aplikasi E-PPID PTUN Jambi ini dapat diakses melalui website resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau langsung ke alamat : ppid.ptun-jambi.go.id.



Gambar 5.4.
Aplikasi E-PPID PTUN JAMBI



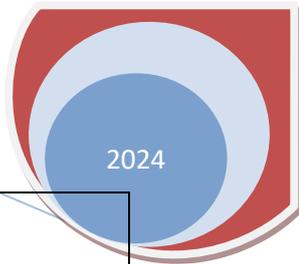
D. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selama tahun 2024 berupaya meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dikarenakan tidak semua orang memiliki pemahaman yang tepat dan benar terkait dunia peradilan. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyampaian informasi mengenai bisnis proses dan berita-berita mengenai kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi kepada publik.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah menyampaikan sejumlah pemberitaan dan atau konten kepada publik melalui media eksternal (website dan media sosial) terkait hasil kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selama 2024. Rekapitulasi Pemberitaan Media Eksternal Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selama tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Pemberitaan Media Eksternal
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2024

NO	Bulan	Jumlah Pemberitaan
1	Januari	30
2	Februari	28
3	Maret	28
4	April	21
5	Mei	34
6	Juni	23
7	Juli	31
8	Agustus	24



9	September	21
10	Oktober	19
11	November	17
12	Desember	24
Total		300

E. PENGHARGAAN

Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah berhasil memperoleh penghargaan baik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun dari lembaga ataupun instansi lain. Berikut beberapa penghargaan yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selama tahun 2024 :

Tabel 5.2.

Penghargaan yang Diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2024

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal Penghargaan	Keterangan
1.	Juara I Kategori penilaian Kinerja satuan Kerja pengadilan Tingkat Pertama Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI	14 September 2024	Lomba Peningkatan Pelayanan Peradilan Tahun 2024
2.	Anugerah Badan Publik Informatif Kategori Instansi Vertikal Provinsi	Komisi Informasi Provinsi Jambi	11 Desember 2024	Acara Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Propinsi Jambi Tahun 2024



Gambar 5.5
Penghargaan Badan Publik Informatif Tahun 2024

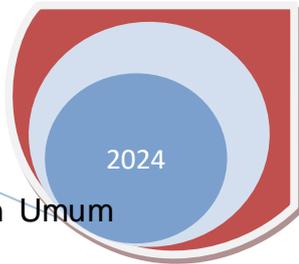


Gambar 5.6
Penghargaan Kategori Penilaian Kinerja Satuan Kerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

1. Pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku baik berupa peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan sebagainya antara lain :
 - a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/II/1994 dan Juklak tentang Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan.
 - b. Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1994 Nomor : MA/Kumdil/207/VIII/K/1994.
 - c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal 11 Mei 1993 tentang Pembinaan Personil dan Kepemimpinan Pengadilan.
 - d. Surat Ketua MARI Nomor : MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 tanggal 1 Agustus 1994 yang menginstruksikan penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Banding) dan penunjukan Hakim Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Pertama).
 - e. Keputusan Ketua MARI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan tanggal 24 Agustus 2006.
 - f. Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
 - g. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 385/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
2. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bertugas sebagai koordinator hakim pengawas bidang.
3. Penunjukan Hakim Pengawas bagi Sub Kepaniteraan Perkara, Sub Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan

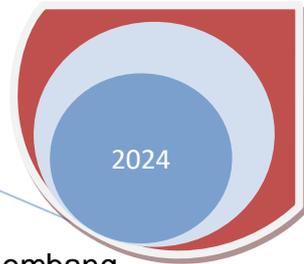


Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, dan Sub Bagian Umum dan Keuangan ditetapkan melalui Surat Keputusan.

4. Pengawasan secara berkala berupa permintaan laporan bulanan ataupun triwulan kepada masing-masing Sub Bagian, Hakim dan Panitera Pengganti.
5. Pengawasan pokok sesuai ketentuan yang ada terhadap bidang masing-masing (pengawasan melekat oleh pejabat yang bersangkutan lebih diaktifkan) yaitu oleh Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Tabel 6.1.
Daftar Nama Hakim Pengawas Bidang

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Oktova Primasari, S.H. NIP. 19751002 200212 2 002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2.	Muhammad Amin Putra, S.H., M.H. NIP. 19930111 201712 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim	<ul style="list-style-type: none">• Pengawas Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan• Pengawas PTSP• Pengawas Posbakum
3.	Sekar Annisa, S.H. NIP. 19941109 201712 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim	<ul style="list-style-type: none">• Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum• Pengawas Bidang Kepaniteraan Perkara
4.	Yohanna Petresia, S.H. NIP. 19940215 201712 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim	<ul style="list-style-type: none">• Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana• Pengawas Bidang Umum dan Keuangan



Disamping itu juga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Tingkat banding telah melakukan pengawasan dan pembinaan rutin serta monev ke setiap satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak terkecuali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan. Melalui kegiatan pengawasan daerah yang rutin diharapkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bisa terlaksana dengan baik sesuai tugas dan fungsinya.

Sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 2 (dua) kali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang melaksanakan kegiatan pembinaan dan atau pengawasan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yaitu pada tanggal 1 Maret 2024 dan pada tanggal 22-24 Juli 2024.

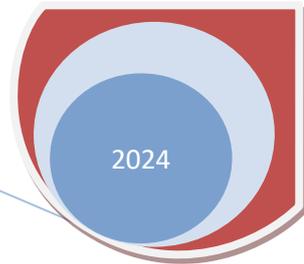
B. Evaluasi

Terhadap kinerja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam melayani para pencari keadilan dilakukan evaluasi dalam bentuk rapat yang dilaksanakan setiap bulan dan laporan pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang yang diberikan kepada Ketua melalui Wakil Ketua sebagai koordinator dari Hakim Pengawas Bidang.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berorientasi kepada pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan dengan menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjadi pengadilan yang modern.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah dibuat dalam program kerja tahun 2024.
3. Dalam melaksanakan program kerja ditunjang dengan biaya dari DIPA Tahun Anggaran 2024.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam mengadili sengketa TUN telah selesai dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
5. Penyerapan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan rencana umum pengadaan dan rencana kegiatan.
6. Dalam melaksanakan kegiatan kerja, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara intens melakukan pembinaan dan pengawasan baik oleh Pimpinan dan Pejabat Struktural serta oleh Hakim Pengawas Bidang.
7. Hasil pengawasan internal secara berkala dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
8. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
9. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah melakukan pelaporan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan maupun kepaniteraan, pelaporan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Dirjen Badilmiltun dan Mahkamah Agung RI melalui email dan dikirim langsung atau melalui pos.
10. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dengan adanya Panitera Pengganti yang diperbantukan pada Kepaniteraan Muda Perkara dan Sub Bagian Umum dan Keuangan.



B. REKOMENDASI

1. Perlu penambahan staf pada seluruh bagian baik kepaniteraan maupun kesekretariatan agar tidak ada lagi rangkap jabatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
2. Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kiranya dapat lebih ditingkatkan lagi kuantitas pelatihan-pelatihan bagi para pejabat struktural dan fungsional guna meningkatkan pemahaman, tanggungjawab dan pengawasan tugas masing-masing.
3. Perlu penambahan fasilitas peralatan dan mesin serta alat pengolah data untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari seperti meja dan kursi kerja, AC Standing, komputer, UPS, scanner, printer, proyektor, lemari arsip dan lain-lain. Selain itu juga perlu penggantian kendaraan dinas khususnya roda 2 serta perlunya renovasi interior ruang PTSP, ruang sidang dan ruang Panitera serta Sekretaris.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2024, apabila terdapat kekurangan di sana-sini kiranya dapat dimaklumi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai dalam mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang bermartabat dan dapat dipercaya.